

SKRIPSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI
PEMANFAATAN RUMPUT LAUT DI KELURAHAN
PABIRINGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN
JENEPONTO



Diva Fhadillah Az-zahra

Nomor Induk Mahasiswa: 105611120719

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

20223

SKRIPSI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PEMANFAATAN RUMPUT LAUT DI KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

DIVA FHADILLAH AZ-ZAHRA

Nomor Induk Mahasiswa: 1056 1112 0719

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

20223

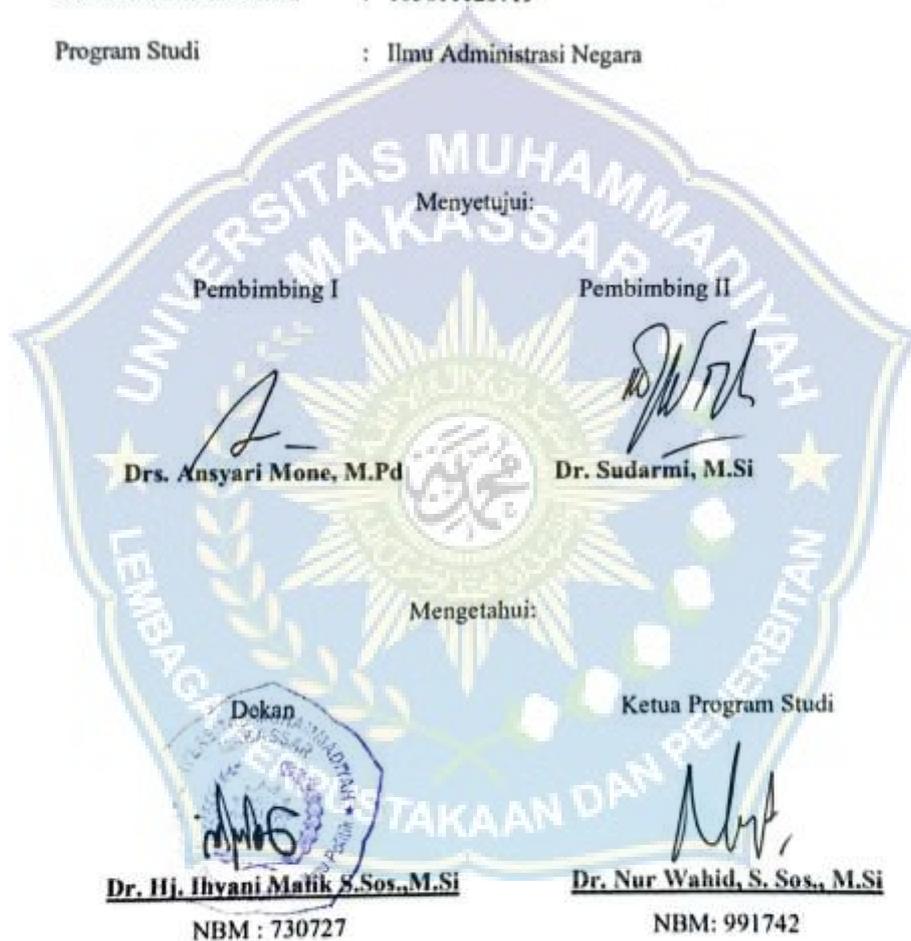
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui
Pemanfaatan Rumput Laut di Kelurahan Pabiringa
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Diva Fhadillah Az-zahra

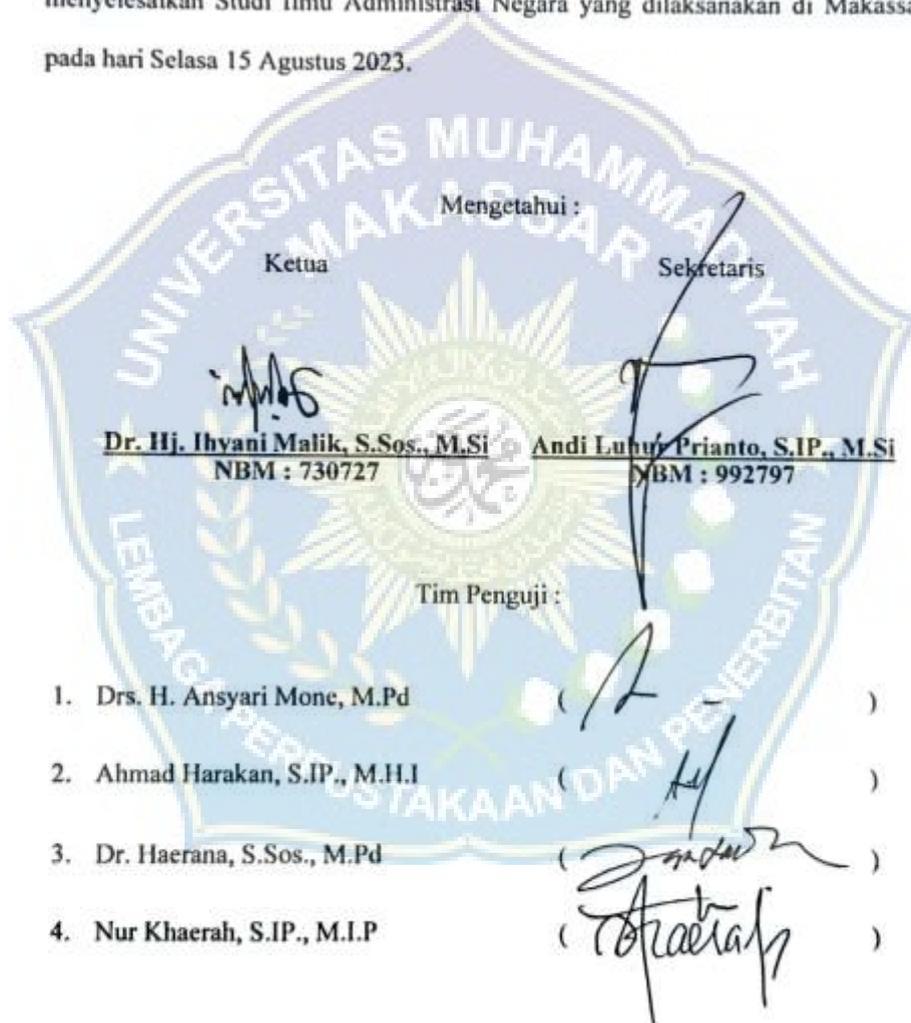
Nomor Induk Mahasiwa : 105611120719

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0174/FSP/A.4-II/VII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa 15 Agustus 2023.



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Diva Fhadillah Az-zahra

Nomor Induk Mahasiwa : 105611120719

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pemyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

Divia Fhadillah Az-zahra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iError! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Konsep dan Teori	13
C. Kerangka Pikir	24
D. Fokus Penelitian.....	25
E. Deskripsi Fokus.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	30
D. Informan.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	31
G. Teknik Pengabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi atau Karakter Objek Penelitian	34
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRAK

Diva Fhadillah Az-zahra, 2023. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Rumput Laut di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Dibimbing oleh Ansyari Mone dan Sudarmi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakuka oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi memberikan informasi tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan rumput laut di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten jeneponto yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten jeneponto cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator pemberdayaan yang meliputi: *enabling* (menciptakan) pemerintah setempat menciptakan suasana yang membuat potensi masyarakat pesisir yang ada di Kelurahan Pabiringa berkembang. Adapun *empowering* (memperkuat) memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat pesisir di Kelurahan Pabiringa melalui langkah-langkah nyata dengan menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan agar masyarakat pesisir dapat mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas, keterampilan, dan peluang ekonomi. Adapun *protecthing* (melindungi) melindungi masyarakat pesisir di Kelurahan Pabiringa, terutama kelompok-kelompok yang lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang merupakan upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat pesisir.

Kata Kunci: pemberdayaan, masyarakat pesisir, rumput laut

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puji syukur, penulis hatur dan panjatkan untuk kehadiran Allah SWT, sang pencipta yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Rumput Laut di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”*.

Berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Bapak Prof. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Plt Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.

4. Bapak Drs. H. Asyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sudarmi, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kedua orang tua penulis bapak Basri. B, S.Pd dan ibuku tersayang Megawati Thaher, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Segala perjuangan penulis hingga titik ini merupakan persembahan untuk kedua orang tua. Terima kasih bapak dan ibu karena telah memberikan pendidikan yang luar biasa.
6. Saudara kandung Alief Alfhadin, Afdhiran Ismatuddzakwan, Disa Asyla Muyassarah dan Dianra Syafiqah Azzalfah serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat.
7. Kepada seluruh Informan staff/pegawai Dinas Kelautan dan Perikan Kabupaten Jeneponto dan masyarakat pesisir Kelurahan Pabiringa yang telah bersedia penulis wawancara dalam membantu proses penelitian penulis ucapkan banyak terima kasih.
8. Untuk sahabat tercinta Dhea Syafitri Safri, Riskayanti S, St. Nur Alisyah Fajriani M, Taris Auliya Anas dan Alifiah Ramadhani Emily yang sudah sangat membantu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Untuk teman SMA Aisyah Chaidir Alwi, Nurul Aulia Ramadhani M, dan Nur Asizah Rusman yang selalu mendukung dan memberikan hiburanya kepada penulis sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.

10. Saudara tercinta di ASERA Sri Wahyuni, Indar, Trinita Sari, Haspianu Muin, Nurfebriana Rasyid, Geri Adrian, Andi Rizwan, Ate, Fadriadi, Ahmad Fadlan, Riswandi dan Muhammad Hamdan. Terimakasih atas pengalaman suka duka selama masa perkuliahan kalian luar biasa.

11. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019, terkhusus kelas IAN-E dan seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Jazakumullah Khairan Katsiran

Billahi Fii Sabilil Haq. Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar 1 Juli 2023

Diva Fhadillah Az-zahra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah pesisir di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu adalah salah satu wilayah dari Kabupaten Jeneponto yang memiliki potensi sumber daya perairan untuk mengembangkan usaha dibidang budidaya rumput laut. Pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya perairan pantai di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu diarahkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya secara efektif, efisien, optimal, dan berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Rumput laut telah tumbuh dan berkembang secara alami maupun budidaya, dimana peranannya cukup penting dalam industri pangan maupun non pangan yang menyebabkan permintaan pasar terhadap rumput laut terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga berperan sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pesisir pantai di Kelurahan Pabiringa. Sayangnya, meskipun produksi rumput laut di kelurahan pabiringa melimpah, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak semaksimal nilai yang semestinya bisa diperoleh.

Dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan, pada konsep pemberdayaan, dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya

(*powerless*) agar mampu baik secara fisik maupun mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini mereka di pandang sebagai orang yang berperan penting untuk mengatasi masalahnya. Pemberdayaan merupakan suatu peningkatan kondisi kehidupan yang ditunjukkan kepada masyarakat.

Pada masyarakat pesisir penumbuhan kembali pendapatan keluarga dengan berbagai usaha salah satunya dengan usaha membudidayakan rumput laut sebagai ladang usaha dalam menghidupi keluarganya. Rumput laut adalah sumber daya lokal yang banyak dihasilkan dan menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar penduduk yang ada di pesisir. Kelurahan Pabiringa mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian salah satunya dalam budidaya rumput laut yang merupakan salah satu komoditas perdagangan yang memiliki potensi yang sangat bagus di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 1998 sampai saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 40/PermenKP/2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu membuat strategi dan program dalam menanggulangi kemiskinan tersebut melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), ada empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1)

menyempurnakan program perlindungan social, 2) peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, 3) pemberdayaan masyarakat, dan 4) pembangunan yang inklusif.

Dari empat strategi di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus berdasar kepada upaya memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan (Rahman & Pansyah, 2019).

Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Sikhondze (dalam Karsidi, 2001), bahwa orientasi pemberdayaan haruslah membantu sasaran (masyarakat pesisir) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pesisir dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Sedangkan peran petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto (pendamping) sebagai outsider people adalah sebagai konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan

demikian peran serta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan (Irawan & Tanzil, 2020).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir merupakan upaya pemerintah yang diprioritaskan di wilayah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki potensi besar dibidang kelautan dan kemaritimannya. Seperti yang tertuang dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut UUD/No 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UUD No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan pemanfaatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir serta pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah antar ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Lomboan et al., 2021)

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pedesaan perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan agar menjadi kuat, maju dan mandiri. Pembangunan desa merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Perkembangan desa-desa di Indonesia berdasarkan Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri, bahwa perkembangan desa mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan, 29% pertahun. Namun sayangnya peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat desa (Fithriyana, 2020).

Pada dasarnya pemberdayaan dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kondisi awal dari masyarakat yang akan diberdayakan. Pemberdayaan hadir tentunya dibarengi dengan alasan rasional yang telah dipikirkan matang-matang yaitu, membentuk masyarakat menjadi mandiri. Masyarakat yang mandiri, tentu saja diharapkan kedepan akan dapat terlepas dalam perangkap ketergantungannya terhadap perusahaan (Safni, 2019).

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan pertanggung jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Pemberdayaan masyarakat perlu digalakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Pembentukan kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dengan dibekali keterampilan dan keahlian serta inovasi-inovasi tambahan mengenai pengelolaan rumput laut diharapkan bisa meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat (Garis et al., 2019).

Memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus merupakan mandat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, sebagaimana pasal 57 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009. Sehingga peran dari pemerintah untuk melakukan

pemberdayaan kepada masyarakat sangat diperlukan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. (Suhu & Wance, 2019)

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan tanggung jawab dari aparaturnya Desa kepada masyarakat untuk memberi pelayanan ataupun bantuan. Dalam konteks ini masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, sedangkan aparaturnya desa berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut.

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat dinamis di berbagai daerah, termasuk pada masyarakat yang berada di wilayah pesisir Kelurahan Pabiringa. Wilayah pesisir di Kelurahan Pabiringa merupakan kawasan pesisir yang sangat strategis, namun dalam pengelolaannya saling tumpang tindih antara kebijakan pemerintah desa. Hal inilah kemudian memicu terjadinya permasalahan-permasalahan lingkungan, kerusakan sumber daya, dan ketidakmampuan daya dukung lahan untuk menopang aktivitas kehidupan di kawasan tersebut. Untuk itu, diharapkan adanya perhatian aparaturnya desa dalam pemberdayaan pesisir.

Salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan adalah masyarakat pesisir, karena masyarakat pesisir pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial, ekonomi, dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Kelompok ini yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir, di pantai pulau-pulau besar dan kecil di seluruh Indonesia.

Sebagian masyarakat pesisir adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsistem, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek. Terkait hal ini pemerintah daerah berupaya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat di pesisir.

Untuk di Kelurahan Pabiringa pemberdayaan masyarakat pesisir dari segi pengorganisasian masih kurang berjalan dengan baik dan tidak teratur dengan efektif dan disisi lain pemberdayaan masyarakat pesisir dari segi penguatan kelembagaan di Kelurahan Pabiringa masih tidak berjalan secara menyeluruh dan merata karena ada kelompok yang mendapatkan bantuan dan ada yang tidak, waktu penyelenggaraannya juga tidak jelas sehingga tidak berjalan dengan optimal dan juga pemberdayaan petani rumput laut dari segi manajemen sumber daya di Kelurahan Pabiringa masih kurang membentuk jaringan strategis antar kelompok/organisasinya dalam pengembangan masyarakat tani baik dalam skala nasional, maupun lokal.

Salah satu fenomena yang terjadi di wilayah pesisir di Kelurahan Pabiringa adalah pemberdayaan masyarakat melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto, program ini sudah ada sejak tahun 2017. Sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin kelautan dan perikanan yang tergabung dalam kelompok usaha yaitu penangkapan ikan, usaha pengolahan hasil perikanan dan usaha budidaya rumput laut. Adanya program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pabiringa. Oleh karena itu pelaksanaan program tersebut harus sepenuhnya dievaluasi sebagai salah satu upaya perbaikan dan pembanguna dalam pengolaanya, sehingga tujuan dari program tersebut dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat pesisir yang ada di Kelurahan Pabiringa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

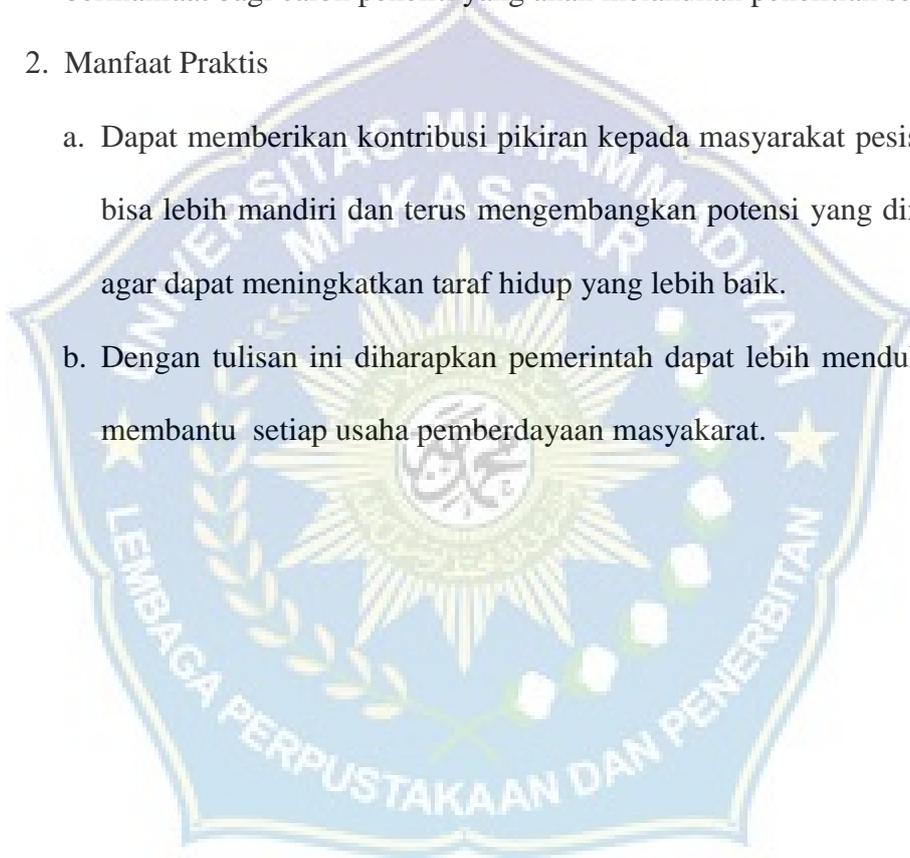
D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Manfaat Akademik Secara akademik diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ekonomi utamanya mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan rumput laut untuk mensejahterakan masyarakat pesisir yang ada di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto serta dapat bermanfaat bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi pikiran kepada masyarakat pesisir untuk bisa lebih mandiri dan terus mengembangkan potensi yang dimilikinya agar dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.
- b. Dengan tulisan ini diharapkan pemerintah dapat lebih mendukung dan membantu setiap usaha pemberdayaan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Zulkifli Muhadli, Tahun 2020, tentang “Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Rumput Laut Desa Labuhan Kertasari Kabupaten Sumbawa Barat”

Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat petani rumput laut dan bagaimana ketetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di bidang ekonomi.

Hasil dari penelitian ini adalah pada implementasinya program pemberdayaan ekonomi masyarakat petani rumput laut yang ada di Desa Labuhan Kertasari sudah tepat namun masih ada beberapa petani rumput laut belum mengetahui program yang sudah ada tersebut. Maka perlunya komunikasi antara petani dengan pemerintah setempat sehingga para petani baik baru ataupun yang lama bisa merasakan manfaat dari adanya program tersebut. Karena dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan perekonomian para petani rumput laut. Seperti kegiatan penanaman bibit rumput laut, cara memelihara tanaman rumput laut baik saat musim hujan, kemarau ataupun pancaroba, cara menghadapi hama tanaman, proses pemanenan rumput laut yang baik sehingga menghasilkan kualitas baik, serta strategi pemasaran untuk memasarkan hasil panen tanaman rumput laut tersebut. Dimana dengan tanaman

rumput laut bisa dijadikan berbagai macam olahan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan atau perekonomian petani rumput laut.

2. Penelitian Awaldi Fuzaindra, Tahun 2018, tentang “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Rumput Laut Di Desa Mapin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa”

Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pengumpulan data menggunakan wawancara kepada 4 orang informan, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Trianggulasi data.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana mendeskripsikan upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui budidaya rumput laut di Desa Mapin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Dan mendeskripsikan hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian melalui budidaya rumput laut di Desa Mapin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.

Hasil penelitian yang dilakukan tentang pemberdayaan masyarakat melalui usaha budidaya rumput laut terhadap peningkatan ekonomi keluarga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut Upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui budidaya rumput laut yaitu menambah pendapatan ekonomi dengan mencukupi kebutuhan keluarga dan mampu membiayai sekolah anak atau cucunya. Dengan adanya budidaya rumput laut memotivasi masyarakat untuk berpikir ke arah

yang lebih maju, selain itu juga merubah gaya hidup mereka yang awalnya belum memiliki kendaraan sehingga memudahkan mereka dalam beraktifitas sehari-hari. Faktor pendukungnya antara lain: sumber daya manusia, masyarakat sekitar yang mendukung, pemerintah, dan letak geografis. Selain itu juga ada faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha budidaya rumput laut, yaitu antara lain: Kendala terkait keterbatasan pemberian bantuan modal, dan bantuan pemerintah dianggap kurang transparan dan tidak adil terhadap petani yaitu terkadang petugas memberikan bantuan kepada orang-orang tertentu yang merasa dekat dengan petugas bahkan terkadang bukan petani. Kondisi iklim dan kandungan nutrisi air laut yang semakin menurun mengakibatkan produksi rumput laut menurun dan kualitas produksi dibawah standar ekspor. Kendala dalam pemasaran karena belum adanya KUD dan juga perusahaan lokal membuat para petani rumput laut bergantung sepenuhnya kepada para pengumpul lokal.

3. Penelitian Muhazir Tuara, Tahun 2021, tentang “Persepsi Masyarakat Tentang Budidaya Rumput Laut Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Dusun Wawasa Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur”

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, dan wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang membudidayakan rumput laut di Dusun Wawasa hampir keseluruhan memperoleh kesejahteraan dalam hal penghasilan dan dapat menunjang kebutuhan hidup serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Wawasa sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam, hal ini dilihat dari usaha yang dilakukan masyarakat setempat tidak bertentangan dengan atauran hukum baik aturan agama maupun Undang-Undang aturan maupun hal-hal yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Dan pendapatan yang diperoleh berdasarkan hasil usaha tidak terdapat unsur-unsur riba dalam usaha membudidayakan rumput laut.

B. Konsep dan Teori

1. Pemberdayaan

a. Sumber Daya Manusia

Pembahasan konsep pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan manusia, konsep pembangunan sumber daya manusia dalam konteks makro merupakan keseluruhan proses aktivitas untuk meningkatkan kemampuan manusia.

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Werther dan Davis (1996) dalam Sutrisno (2017), menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.

Noe 2008, konsep pengembangan sumber daya manusia (PSDM) dalam organisasi, hakikatnya merupakan suatu usaha demi peningkatan daya saing terhadap ancaman lingkungan eksternal dan upaya meningkatkan daya inovatif demi menciptakan peluang. PSDM dalam organisasi bersifat integral sebagai individu dan sistem serta organisasi sebagai wadah SDM secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan (Labola, 2019).

Menurut Bahuguna dan Kumari (2006) dalam buku “Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia” dijelaskan bahwa manajemen SDM menggunakan pendekatan yang lebih terencana yaitu memilih orang yang tepat untuk dipekerjakan, memberikan pelatihan kepada mereka, menyusun desain pekerjaan, serta merancang system kompensasi termasuk rencana tunjangan dan pelayanan yang diberikan untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan karyawan.

b. Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan biasanya populer digunakan dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya, pihak yang lemah atau yang biasa disebut dengan ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini adalah memiliki kelemahan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat kerja, ketekunan, dan aspek-aspek lainnya. Kelemahan dalam aspek-aspek tersebut diatas dapat menyebabkan ketergantungan, ketidakberdayaan bahkan kemiskinan (Fikry & Ghozali, 2022).

Pemberdayaan di lingkungan muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu, ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory* (Noor, 2011: 87). Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek (Noor, 2011: 87):

1. *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.

2. *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

3. *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Menurut Slamet (2003) definisi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya.

Secara tidak langsung pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat yang sesuai inisiatifnya. Pemberdayaan juga memiliki makna menghidupkan kembali tatanan nilai, budaya, dan kearifan lokal dalam membangun jati dirinya sebagai individu dan masyarakat.

Sumodiningrat (2004) menyatakan bahwa pemberdayaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan kerja terbuka wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, agar membuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Daulay (2006), pemberdayaan adalah serangkaian wujud upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar sehingga mampu menjadi pelaku dalam proses pembangunan yang partisipatif dan aktif.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan individu dan kelompok untuk mendorong kepercayaan diri masyarakat, sehingga dalam hal inilah maka kehidupan masyarakat di wilayah yang bersangkutan bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi

dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum definisi pemberdayaan adalah upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat, hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai manusia dan warga Negara. Selain itu pemberdayaan juga didefinisikan sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan (Margolang, 2018).

Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable”.

Konsep pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat berdaya melalui dorongan atau motivasi untuk

membangkitkan kesadaran terhadap pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki (Suriyanti et al., 2022).

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan” (RAHMAYANTI et al., 2020).

Mengutip buku Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan, yang ditulis Eko Sudarmanto dkk (2020:21), pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan.

Edi Suharto, 2010: 57-60 “Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat” Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau

kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunandan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Menurut Abdul (2012) pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif. Menurutnya partisipasi aktif dan kreatif dinyatakan sebagai partisipasi yang mengacu pada sebuah proses aktif yang dengannya kelompok sasaran bisa mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan ketimbang hanya semata-mata menerima pembagian proyek keuntungan (Fernanto et al., 2022).

Menurut Paul A. Samuelson (Sukwiaty, 20007:101) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi sebagai suatu study tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditas dan penyalurannya, baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu dan kelompok dalam suatu masyarakat (Lomboan et al., 2021).

Dari berbagai tulisan Sumodiningrat (1999), konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:
(1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang

telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. (Sumidiningrat, Gunawan (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia; Jakarta.)

Usaha menyusun konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidak berdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam menyusun konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.

Pemberdayaan ekonomi rakyat dijelaskan oleh Ginandjar Kartasasmita (1996:70), bahwa pemberdayaan ekonomi adalah: “Upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya”. Meskipun uraian berikut tidak mewakili pemahaman birokrasi pemerintah secara keseluruhan, tetapi paling tidak dapat membantu kita untuk memahami konsep strategi pemberdayaan menurut birokrasi pemerintah, khususnya pemerintahan desa (Fany et al., 2021).

Namun dalam upaya pembangunan ekonomi di desa memiliki banyak tantangan. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya berkaitan dengan kondisi eksternal dan internal. Kondisi eksternal seperti perkembangan internasional yang berhubungan dengan investasi dan perdagangan global. Sedangkan kondisi internal berkaitan dengan kondisi di dalam negeri seperti halnya ketahanan pangan, ketersediaan lapangan pertanian, permodalan, masalah sumber daya manusia (SDM) , lingkungan dan sebagainya (Fithriyana, 2020).

2. Rumput Laut

Rumput laut merupakan salah satu sumberdaya penting yang terdapat di wilayah pesisir. Keberadaan rumput laut mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi pesisir di beberapa daerah di Indonesia (Wahyudin, 2012).

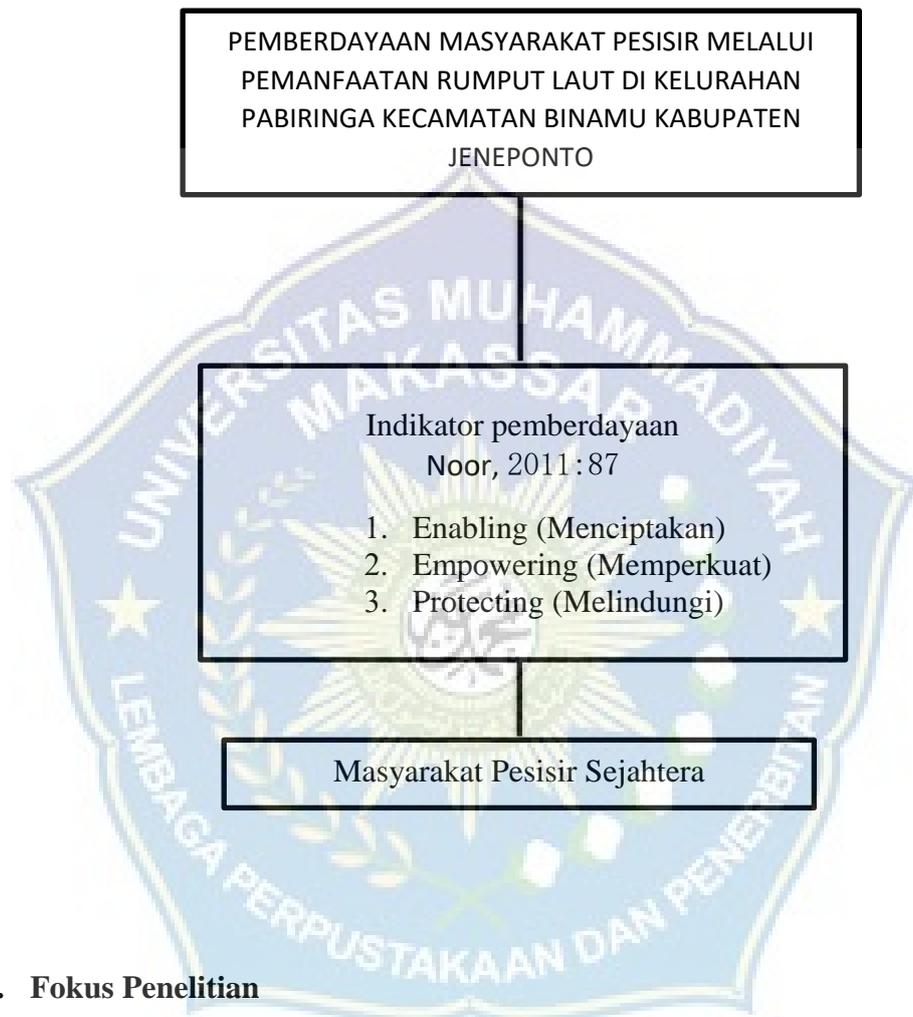
Rumput laut merupakan salah satu komoditi budidaya laut yang menjadi unggulan. Rumput laut merupakan komoditas penting untuk menopang tingkat perekonomian masyarakat. Usaha tani rumput laut banyak diminati masyarakat dengan pertimbangan teknologi budidaya yang mudah, waktu pemeliharaan relatif singkat, dan pasar yang cukup tersedia, serta harga yang kompetitif (Rusli et al., 2020)

Rumput laut (*Euchema Sp.*) merupakan salah satu sumber daya alam hayati Indonesia, yang mempunyai nilai ekonomis penting dalam industri kosmetik, pangan dan kesehatan. Rumput laut banyak diolah dalam bentuk kering setelah melalui proses penjemuran atau menjadi makanan siap konsumsi, seperti dodol, manisan, selai, kerupuk dan minuman yang sudah dikenal masyarakat Indonesia. Rumput laut bermanfaat sebagai antioksidan, anti peradangan, anti diabetes dan anti kanker (Sanger & Assa, 2018).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan konsep teoritis agar mudah dipahami. Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir bagi penulis, yang digunakan sebagai pemandu dan petunjuk arah yang hendak dituju. Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Rumput Laut Di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah yang menjadi tolak ukur pencapaian pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Kelurahan Pabiringa dalam pemanfaatan rumput laut. Dengan adanya fokus penelitian ini, penulis dapat menghindari data-data yang tidak relevan sehingga masalah dan tujuan dalam melakukan penelitian terdapat batasan-batasan. Maka dari itu penulis memfokuskan penelitian ini tentang

Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Rumput Laut di Kelurahan Pabiringa, sehingga masyarakat pesisir bisa lebih mandiri dan terus mengembangkan potensi yang dimilikinya agar dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

E. Deskripsi Fokus

Fokus penelitian yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator yaitu:

1. *Enabling*, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. *Empowering*, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. *Protecting*, melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto, yang berlokasi di JL. HV. Worang (Komp. PPI Tanrusampe) Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu, Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah surat izin penelitian diberikan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni metode penelitian yang dimana pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan, observasi dan dokumentasi.

Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan

analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasan teori.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki dan mengkaji perspektif partisipasi dengan strategi strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alimiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci maka metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran proritas penggunaan dan desa turatea dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebab penulis ingin menggambarkan/mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Rumput Laut Di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam narasumber dan observasi langsung sesuai objek penelitian terhadap bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara laporan atau dokumentasi di lapangan berupa foto yang dapat dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber data tersebut.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang memberikan informasi kepada peneliti atau sebagai informan yaitu orang-orang yang dapat memberikan serta melengkapi informasi tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Rumput Laut di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto seperti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jeneponto, Staff Kelautan dan Perikanan Jeneponto dan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Abdul Rajab Rahman, S.E	ARR	Sub bagian umum dan kepegawaian
2.	Hi. Marlina Lahabo, S.Pi, MM	HML	Kabid. Pengelolaan Perikanan Budidaya
3.	Anto Alam	AA	Masyarakat Pesisir
4.	Asmiati Aziz	AA	Masyarakat Pesisir
5.	Baradu	BR	Masyarakat Pesisir
6.	Nurhayati	NH	Masyarakat Pesisir

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang sistematis dan baku guna memperoleh informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Maka peneliti berusaha dalam mencari data yang valid dengan melakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan bertujuan untuk menganalisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Rumput Laut.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu: ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dengan demikian peneliti menggali suatu informasi dengan melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan sebelum melakukan wawancara.

3. Dokumentasi

Teknik dalam dokumentasi berupa suatu pengumpulan data menggunakan data berupa foto, tulisan dan arsip yang bisa digunakan untuk sumber data. Dalam teknik dokumentasi sebagai alat untuk melengkapi data dari sebuah wawancara dan observasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang dilakukan untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis induktif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan alur kedua pada kegiatan analisis data. Data maupun informan yang terdapat di lapangan digabungkan ke dalam suatu matriks, penyajian data yaitu berbagai jenis matriks, jaringan, grafik, serta bagan.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Berbagai informasi yang teratur memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian pada suatu kegiatan. Kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Pada penelitian kualitatif, prinsip pokok teknik analisisnya adalah menganalisis dan mengelola data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, bermakna, serta terstruktur.



G. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi bermakna yaitu mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta melakukan pengecekan pada waktu yang berbeda. Keperluan triangulasi dilakukan tiga cara:

1. Triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh suatu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan tidak akuratnya.
3. Triangulasi waktu yaitu triangulasi yang berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakter Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara makro bentang alamnya terdiri dari daerah dataran terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 Km Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, secara geografis terletak antara 5°16'13"-5°39'35" Lintang Selatan dan antara 12°40'119"-56'44,9' Bujur Timur.

Kabupaten Jeneponto dengan ibu kota Bontosunggu sebagai salah satu sentra produksi garam di Sulawesi Selatan, terletak 91 Km di sebelah selatan Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 749,79 Km² atau 74.979 Ha, yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 113 Desa/Kelurahan.

Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan takalar

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Takalar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto adalah 74.9799 Ha atau 749,79 Km² dan hanya 20% dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi :

Tabel 4.1 Kecamatan. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kab. Jeneponto

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Presentasi terhadap luas kabupaten (%)
1.	Bangkala	121,82	16,25
2.	Bangkala Barat	152,96	20,40
3.	Tamalatea	57,58	7,68
4.	Bontoramba	88,30	11,78
5.	Binamu	69,49	9,27
6.	Turatea	53,76	7,17
7.	Batang	33,04	4,41
8.	Arungkeke	29,91	3,99
9.	Tarowang	40,68	5,43
10.	Kelara	43,95	5,86
11.	Rumbia	58,30	7,78
Total		749,79	100,00

Sumber: BPS Kab.Jeneponto

Kabupaten Jeneponto memiliki morfologi wilayah yang komplit, meliputi bagian utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 500 sampai 1.400

meter di atas permukaan laut, bagian tengah meliputi wilayah dataran rendah dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut dan bagian selatan meliputi wilayah dataran rendah dan pesisir dengan ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Hal ini dapat mengundang tumbuhnya investasi berbasis potensi wilayah pada masing-masing zona.

3. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto terletak di JL. HV. Worang (Komp. PPI Tanrusampe) Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu, Telp. 0419-21091, FAX 0419-21977, Kode Pos 92315. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto dipimpin oleh seorang kepala dinas sebagai pemimpin dan dibantu oleh seorang sekretaris, kasubag. perencanaan dan keuangan, kasubag. umum dan kepegawaian, kabid. pengawasan dan pengelolaan hasil perikanan, kabid. pengelolaan perikanan tangkap, kabid. pengelola perikanan budidaya, kepala UPTD dan kepala tata usaha.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

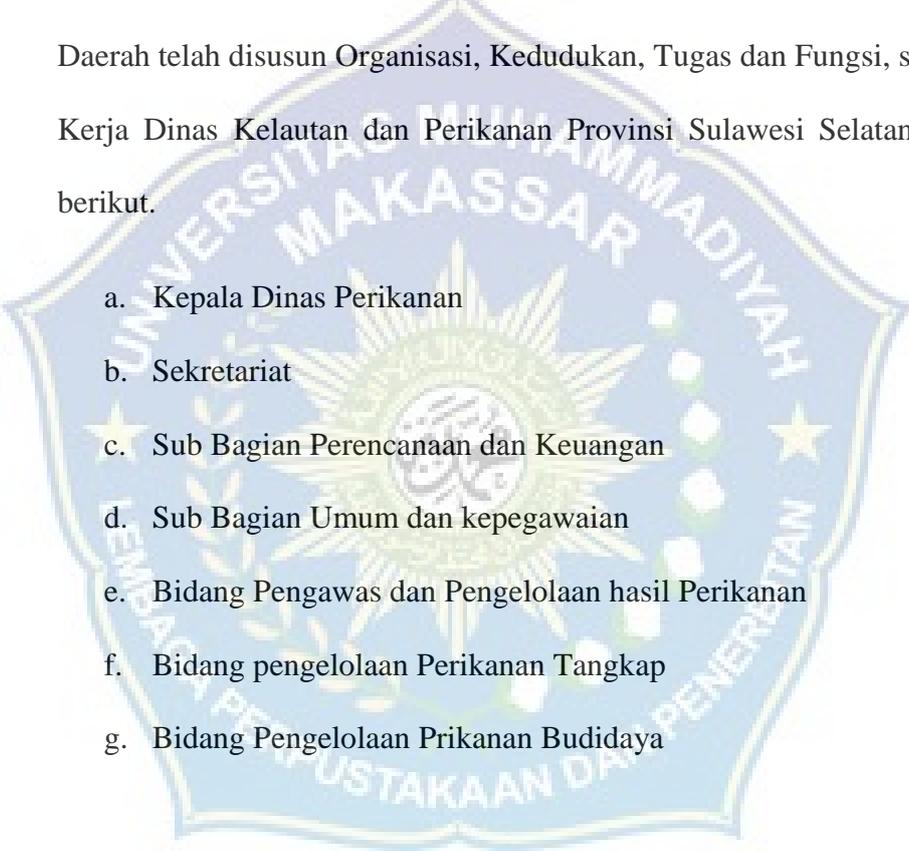
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan administrasi dan teknis bidang Kelautan dan Perikanan. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain. Melaksanakan pembinaan

umum di bidang Kelautan dan Perikanan. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan.

4. Susunan Organisasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Jeneponto

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

- 
- a. Kepala Dinas Perikanan
 - b. Sekretariat
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - d. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - e. Bidang Pengawas dan Pengelolaan hasil Perikanan
 - f. Bidang pengelolaan Perikanan Tangkap
 - g. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

5. Visi dan Misi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Jeneponto

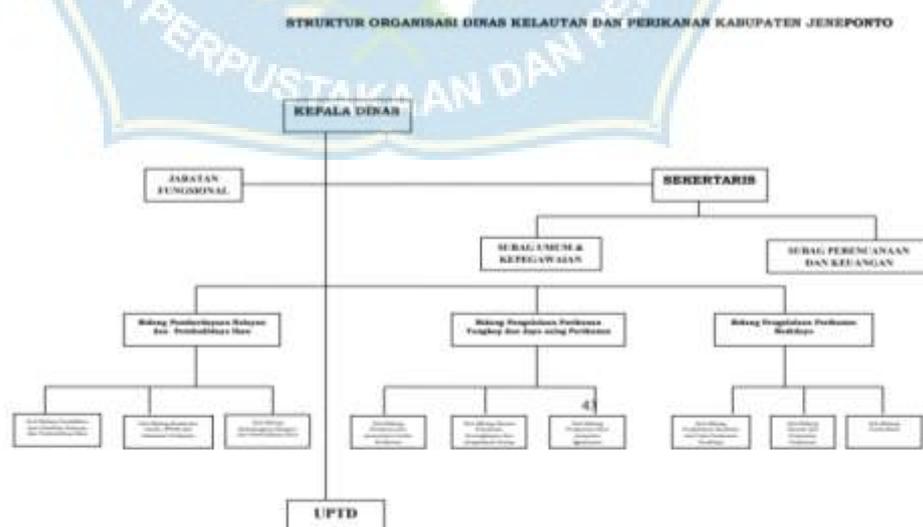
Visi

Menjadikan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian dalam rangka peningkatan daya saing daerah menuju masyarakat Jeneponto yang sejahtera.

Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
3. Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang memberikan nilai tambah terhadap kegiatan ekonomi lainnya
4. Meningkatkan SDM kelautan dan perikanan serta sarana dan prasarana.

6. Struktur Organisasi Kantor Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto



Sumber: Internet

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten jenepono adalah sebagai berikut;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
- d. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
- e. Kabid. Pengawasan dan Pengelolaan Hasil Perikanan
 1. Sub Koordinator Pengembangan SDM Perikanan
 2. Sub Koordinator Kemitraan Usaha, IPTEK dan Informasi Perikanan
 3. Sub Koordinator Kelembagaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan
- f. Kabid. Pengelolaan Perikanan Tangkap
 1. Sub Koordinator Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan
 2. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Penangkapan dan pengelolaan Ruang Laut
 3. Sub Koordinator penguatan Daya Saing dan Pemasaran
- g. Kabid. Pengelola Perikanan Budidaya
 1. Sub Koordinator Pengelolaan Kawasan dan Data Pembudidaya
 2. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
 3. Sub Koordinator Perbenihan
- h. Kepala UPTD
- i. Kepala tata Usaha UPTD

7. Jumlah Pegawai

Nama Pegawai	Jabatan
Arfan Sanre, SH, MM	Kepala Dinas
H.Mitradiyanto M, SE, MM	Sekretaris
Ibrahim, S.ST.Pi, Msi	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Abdul Rajab Rakhman, SE	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Ir. Asri. M.Si	Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Hasil Perikanan
Nurdianah, S.Pi	Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Baharuddin, M.SE	Sub Koordinator Kemitraan Usaha, IPTEK dan Informasi
Zulbair, S.Pi	Sub Koordinator Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya
Irmawaty Madjading, S.Pi, M.Si	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
Dwi Ratna Yuliasuti, S.Pi	Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
Samsuddin, SE, M.AP	Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Pengelolaan Ruang Laut
Kaharudin, S.Pi	Sub Koordinator Penguatan Daya Saing dan Pemasaran
Hi. Marlina Lahabo, S.Pi, MM	Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
Nurlaelah, SP	Sub Koordinator Pengelolaan Kawasan dan Data Pembudidayaan
A.Indrawati Hamka, SE	Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
Ismayanti Bisma, S.Pi, M.Si	Sub Koordinator Perbenihan
Evendi Amba, SE	Kepala UPT
Kemal Ilyas Mattewakkang, SE	Kasubag Tata Usaha

B. Hasil Penelitian

Adapun data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pemanfaatan Rumput Laut di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada indikator:

1. *Enabling* (Menciptakan)

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap

masyarakat itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang berupaya untuk mengembangkannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama selaku Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya beliau mengemukakan bahwa:

” Kalau khusus pembudidaya rumput laut itu ada beberapa macam pemberdayaan yang kita berikan, pertama itu tali temali dua jenis (tali nomor satu dan tali nomor empat) ataupun kalau dalam bentuk kebun bibit itu lengkap, ada tali nomor satu, nomor empat, nomor sepuluh, pelampung dasar dan pelampung atas, bibit rumput laut. Untuk pasca panen itu (untuk pengeringan) ada waring dan para-para untuk pengangkutannya kita sediakan gerobak dan perahu.” (Wawancara HML 24 Mei 2023)

Lanjut wawancara bersama selaku masyarakat pesisir kelurahan Pabiringa beliau memberikan pendapatnya sejalan dengan informan sebelumnya, beliau mengatakan:

“ Selama ini yang kami lihat bantuan dari Dinas kelautan dan Perikanan itu berupa bibit agar (rumput laut), bentangan (tali temali), jarring yang berwarna hitam (waring), untuk penjmur juga dan perahu atau kalau orang disini menyebutnya biseang” (Wawancara AA 27 Mei 2023)



Sumber: Internet

Gambar 4.1
(Pemberian bantuan)

Berdasarkan hasil wawancara bersama di atas maka dapat di simpulkan bahwa dari segi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sudah memadai karena telah memberikan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Dilihat dari pemberian mulai dari pembibitan, penyediaan tali temali, penjemuran hingga alat transportasi yang digunakan setelah pasca panen. Pemberian alat dan bahan ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah setempat.

Berdasarkan wawancara bersama selaku masyarakat pesisir kelurahan Pabiringa beliau mengatakan:

“Kalau selain alat-alat yang dikasih sama pemerintah, ada juga beberapa pelatihan tentang pengelolaan rumput laut tapi masih kurang”
(Wawancara NH 27 Mei 2023)



Sumber: Internet

Gambar 4.2
(pelatihan pengelolaan rumput laut)

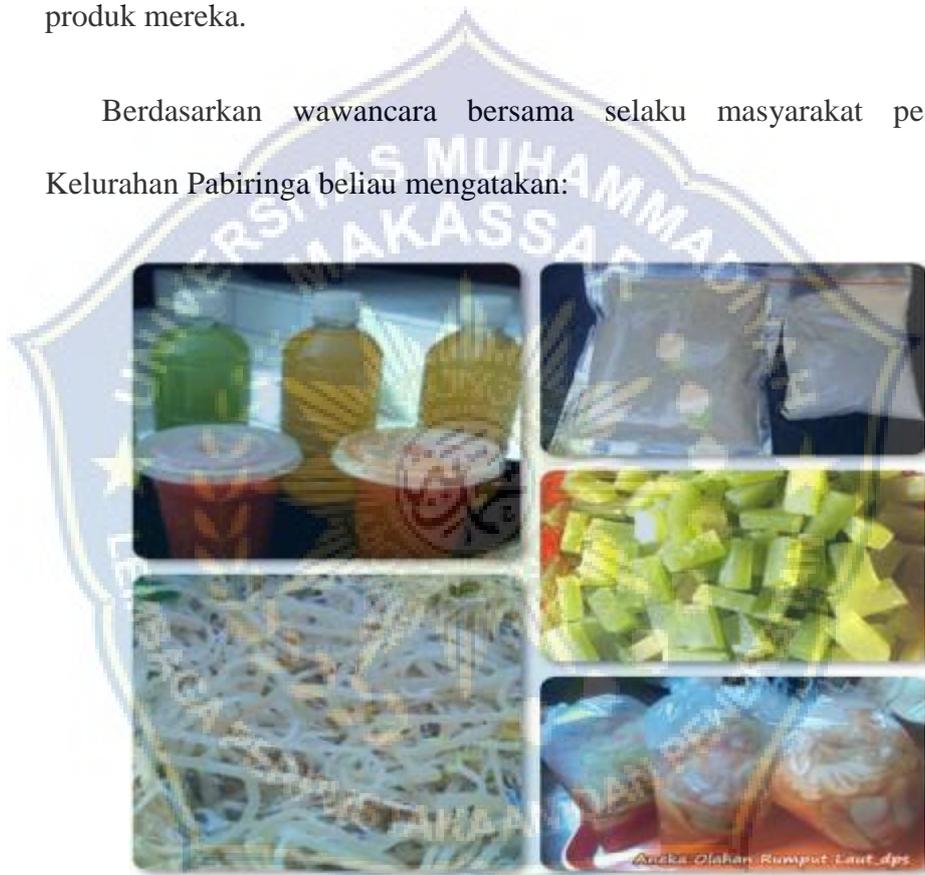
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah setempat bukan hanya dalam bentuk benda saja tetapi dalam bentuk pelatihan meskipun pelatihan yang diberikan belum efektif. Dinas Kelautan dan Perikanan harusnya lebih memperhatikan lagi apa saja yang dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat pesisir.

Berasarkan hasil wawancara bersama selaku masyarakat pesisir beliau mengemukakan:

“Alhamdulillah, selama ini rumput laut sangat membantu perekonomian masyarakat pesisir karena kenapa seperti yang saya lihat selama saya berada di perikanan pembudidaya rumput laut mulai berkembang. Contohnya sudah banyak tukang becak yang tidak lagi ke Makassar karena budidaya rumput laut ini salah satu usaha yang tidak terlalu membutuhkan banyak modal, kita beri bibit satu kali selanjutnya dia bisa kembangkan lagi untuk seterusnya.” (Wawancara HML 27 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat pesisir tentang teknik budidaya rumput laut yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, petani rumput laut dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas produk mereka.

Berdasarkan wawancara bersama selaku masyarakat pesisir di Kelurahan Pabiringa beliau mengatakan:



Sumber: Internet

Gambar 4.4
(inovasi pengeloan rumput laut)

“Sebenarnya rumput laut itu banyak manfaatnya, seperti bisa dibuat kerupuk, sirup rumput laut, brownis rumput laut dan dodol rumput laut cuman permintaan pasar untuk disini belum ada.” (Wawancara NH 27 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat harus berupaya untuk melaksanakan koordinasi dengan menghubungkan petani rumput laut dengan perusahaan pengolahan rumput laut agar hasil inovasi dari pengelolaan rumput laut dapat dipasarkan.

2. *Empowering*

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

Berdasarkan wawancara bersama selaku masyarakat pesisir kelurahan Pabiringa beliau mengatakan:

“Dengan adanya rumput laut ini kami masyarakat pesisir berlomba-lomba menanam rumput laut sampai panen, di jemur lalu dijual ke pengumpul. Karna dengan adanya pemanfaatan rumput laut perekonomian kami membaik karna sudah fokus ke rumput lautnya.” (Wawancara BR 24 Mei 2023)

Lanjut wawancara bersama selaku masyarakat pesisir beliau juga mengatakan bahwa:

“Bukan hanya laki-laki saja yang dapat bekerja tetapi kita juga perempuan ikut mendapat penghasilan contohnya, a’bibi (mengikat rumput laut pada tali bentang), mengumpulkan rumput laut yang terlepas dari bentangnya waktu panen lalu kita jemur dan dijual ke pengumpul/pembeli.” (Wawancara AA 27 Mei 2023)



Sumber: Internet

Gambar 4.3
(ibu-ibu mengikat rumput laut)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya budidaya rumput laut ini memiliki potensi ekonomi yang besar karena berbagai manfaatnya yang dapat dimanfaatkan. Namun, perlu diingat bahwa pemanfaatan rumput laut harus dilakukan dengan bijaksana dan berkelanjutan. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan penurunan populasi rumput laut dan dampak negatif pada lingkungan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penting untuk pemerintah setempat mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut ini.

Lanjut wawancara bersama staff Dinas Kelautan dan Perikanan beliau mengemukakan:

“Untuk dari Dinas itu sendiri memberikan pembinaan secara berkelompok. Mengapa kita berikan secara berkelompok, supaya ada yang bertanggungjawab secara khusus dan untuk memperkuat komunitas dan membangun kerjasama antar anggota masyarakat pesisir.” (Wawancara HML 24 Mei 2023)

Beliau juga mengatakan:

“Kelompok bisa mendapat bantuan kalau minimal sudah 1 tahun berjalan kelompoknya, tapi kalau baru terbentuk itu belum masuk kategori kita untuk mendapat bantuan” (Wawancara HML 24 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat bertujuan untuk menciptakan masyarakat pesisir yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui pendekatan pembinaan perkelompok. Dengan demikian, masyarakat pesisir diharapkan dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Lanjut wawancara bersama selaku staff kantor Dinas Kelautan dan Perikanan beliau mengatakan:

“Menurut saya pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat pesisir sudah tepat sasaran karena sebelumnya kita melakukan verifikasi kelompok dulu tidak serta merta yang bawa proposal itu kita terima karena kenapa, yang kita takutkan yang bawah proposal itu bukan pembudidaya.” (Wawancara AAR 24 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap komunitas pesisir memiliki karakteristik unik dan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus diadaptasi secara lokal agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masyarakat pesisir tersebut.

3. *Protecting*

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah

terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Berdasarkan wawancara bersama selaku Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian beliau mengemukakan bahwa:

“ Pentingnya untuk kita melakukan evaluasi berkala terhadap program pemberdayaan untuk mengetahui dampaknya dan memastikan bahwa tujuan yang kita tetapkan tercapai, dengan pengawasan yang ketat dan transparan juga penting untuk memastikan dana dan sumber daya yang diberikan mereka gunakan dengan benar dan mencapai hasil yang diharapkan.” (Wawancara AAR 24 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan melakukan evaluasi berkala terhadap program pemberdayaan, pemerintah setempat dapat memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang diharapkan, dan terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan konteks yang ada. Masukan ini penting untuk memahami perspektif masyarakat, mengetahui kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi, dan mengidentifikasi peluang perbaikan yang dapat diterapkan oleh pemerintah setempat.

Lanjut wawancara bersama selaku kabid pengelola perikanan pembudidayaan juga mengatakan:

”Yang berhak mendapat bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut ya itu, pembudidaya rumput laut. Tujuannya kita untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan kuantitas rumput lautnya. Penting untuk dicatat bahwa kriteria dan seleksi penerima bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sasaran program yang dijalankan”(Wawancara HML 24 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus memahami bahwa kriteria dan seleksi penerima bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat bervariasi, pemerintah menghindari pendekatan yang "satu ukuran cocok untuk semua" dan lebih efektif dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat di daerah pesisir.

Berdasarkan wawancara bersama selaku masyarakat pesisir kelurahan Pabiringa beliau mengatakan:

”Kalau kita melihat slama ini tepat sasaran karena semua petani rumput laut tanpa terkecuali ikut merasakan dampak positive setelah mendapat bantuan dari pemerintah setempat.” (Wawancara AA 27 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah setempat dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Program pemberdayaan yang tepat sasaran memungkinkan pemerintah memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat pesisir, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesinambungan ekonomi serta lingkungan masyarakat pesisir secara keseluruhan.

C. Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan membahas terlebih dahulu bentuk-bentuk pemberdayaan

1. Bentuk pemberdayaan budidaya rumput laut

a. Pelatihan

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan memberdayakan masyarakat

petani rumput laut melalui pelatihan yang di bagi menjadi 4 bentuk pelatihan. Yang pertama adalah presentasi metode pembudidayaan rumput laut dari awal proses budidaya hingga masa panen rumput laut, kedua adalah praktik pemasangan pondasi, ketiga adalah pelatihan pemasangan bibit dengan menggunakan tali dan botol bekas sebagai pelampungnya, dan yang keempat adalah berupa jenis bibit yang tepat digunakan di perairan tertentu.

b. Pendanaan

Adapun pemberian bantuan pendanaan melalui APBD kota dapat membantu kebutuhan para petani rumput laut.

Menurut data DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto tahun 2022 anggaran yang dikeluarkan oleh APBD kota terhadap pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota Rp. 2.302.000.000.

c. Pemasaran

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto harus berupaya untuk melaksanakan koordinasi dengan menghubungkan petani rumput laut dengan perusahaan pengolahan rumput laut.

Dari segi pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan masih kurang efektif, karena sudah ada beberapa produk dari manfaat pengelolaan rumput laut tapi belum dipasarkan.

2. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Untuk meningkatkan kondisi perikanan dan memberdayakan nelayan,

terutama nelayan miskin di wilayahnya, pemerintah Kabupaten sebaiknya melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan Bantuan Alat Tangkap Bantuan alat tangkap adalah salah satu upaya paling penting untuk mensejahterakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggiran pantai khususnya para nelayan yang mata pencariannya dilaut.
- b. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana dan pemeliharaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Kabupaten perlu menambah jumlah TPI di setiap kecamatan. Selain itu Pemkab perlu menyediakan anggaran untuk perawatan dan tambahan sarana prasarana lain sehingga kegiatan pelelangan di Kabupaten akan lebih lancar.
- c. Pembinaan pembinaan dan sosiasasi baik teknis maupun non teknis perlu ditingkatkan, baik pembinaan yang sifatnya rutin maupun pembinaan maupun sosialisasi yang insidental. Dinas Kelautan dan Perikanan saja namun juga harus melibatkan instansi-instansi terkait lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar dalam mengatasi persoalan yang cukup kompleks tidak hanya diselesaikan secara sepihak dan untuk mencegah terjadinya konflik yang tak berujung. Misalnya pembinaan teknis penangkapan dan budidaya perikanan laut, pembinaan kehidupan sosial ekonomi, sosialisasi hukum dan perundang-undangan, serta pembinaan/ sosialisasi lainnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan yang membantu

penyeleenggaraan lelang.

- d. pemasaran Untuk mengatasi kesulitan akses transportasi dan pemasaran hasil/produk perikanan diperlukan adanya koordinasi yang lebih intensif dan maksimal antar instansi terkait dengan perusahaan pelengan ikan.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan bahwa wilayah pesisir di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu adalah salah satu wilayah dari Kabupaten Jeneponto yang memiliki potensi sumberdaya perairan yang baik untuk mengembangkan usaha dibidang budidaya rumput laut. Pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya perairan pantai di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu diarahkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya secara efektif, efisien, optimal, dan berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory* (Noor, 2011: 87). Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek (Noor, 2011: 87):

1. *Enabling* (Menciptakan)

Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat yang ada di Kelurahan Pabiringa dapat berkembang. Peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat pesisir akan meningkatkan potensi mereka dalam mengembangkan usaha dan mencari kesempatan kerja yang lebih baik. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan pendidikan yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

Pemerintah harus mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan pembangunan wilayah mereka. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah dapat membantu mempromosikan dan mendukung usaha lokal yang berbasis di sumber daya pesisir. Ini bisa dilakukan melalui dukungan keuangan, pelatihan wirausaha, atau akses ke pasar yang lebih luas.

Secara keseluruhan, pemerintah harus berperan aktif dalam mengidentifikasi dan memahami potensi dan menantang masyarakat pesisir serta melakukan tindakan nyata untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi mereka berkembang secara berkelanjutan. Kesenambungan dan partisipasi aktif dari masyarakat pesisir juga merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi mereka berkembang secara berkelanjutan.

2. *Empowering* (Memperkuat)

Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat pesisir melalui langkah-langkah nyata yang melibatkan penyediaan berbagai masukan berarti melakukan tindakan konkret untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dengan menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan agar mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas, keterampilan, dan peluang ekonomi.

Langkah-langkah ini mencakup berbagai macam aspek, termasuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, infrastruktur, akses ke pasar, perlindungan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan inovasi. Dengan tersedianya berbagai masukan dan dukungan ini diharapkan masyarakat pesisir dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan wilayah mereka dan pencapaian keberlanjutan ekonomi serta lingkungan.

Sebagai contoh, penyediaan berbagai masukan berarti memberikan pelatihan dan keterampilan pendidikan bagi nelayan atau petani pesisir untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini juga bisa berarti menyediakan bantuan modal usaha atau kredit dengan suku bunga rendah agar masyarakat pesisir dapat mengembangkan bisnis mereka. Pemerintah juga dapat membangun infrastruktur seperti pelabuhan atau akses jalan untuk meningkatkan konektivitas wilayah pesisir dengan pasar dan pusat perdagangan.

Selain itu, pemerintah perlu mendukung upaya dalam penyimpanan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan agar potensi ekonomi dari sektor seperti perikanan atau pariwisata pesisir tetap dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Pendekatan berbasis riset dan inovasi juga dapat membantu masyarakat pesisir dalam mengadopsi teknologi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, langkah-langkah ini harus merencanakan pemberdayaan masyarakat pesisir, partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan, dan pembangunan berkelanjutan, sehingga potensi yang dimiliki oleh masyarakat pesisir dapat benar-benar diperkuat dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi mereka dan wilayah pesisir secara keseluruhan.

3. *Protecting* (Melindungi)

Melindungi masyarakat pesisir, terutama kelompok-kelompok yang lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang merupakan upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat pesisir. Ini berarti memberikan perlindungan dan dukungan kepada kelompok-kelompok yang rentan dan kurang berdaya agar mereka dapat bersaing dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial wilayah pesisir dengan adil dan seimbang.

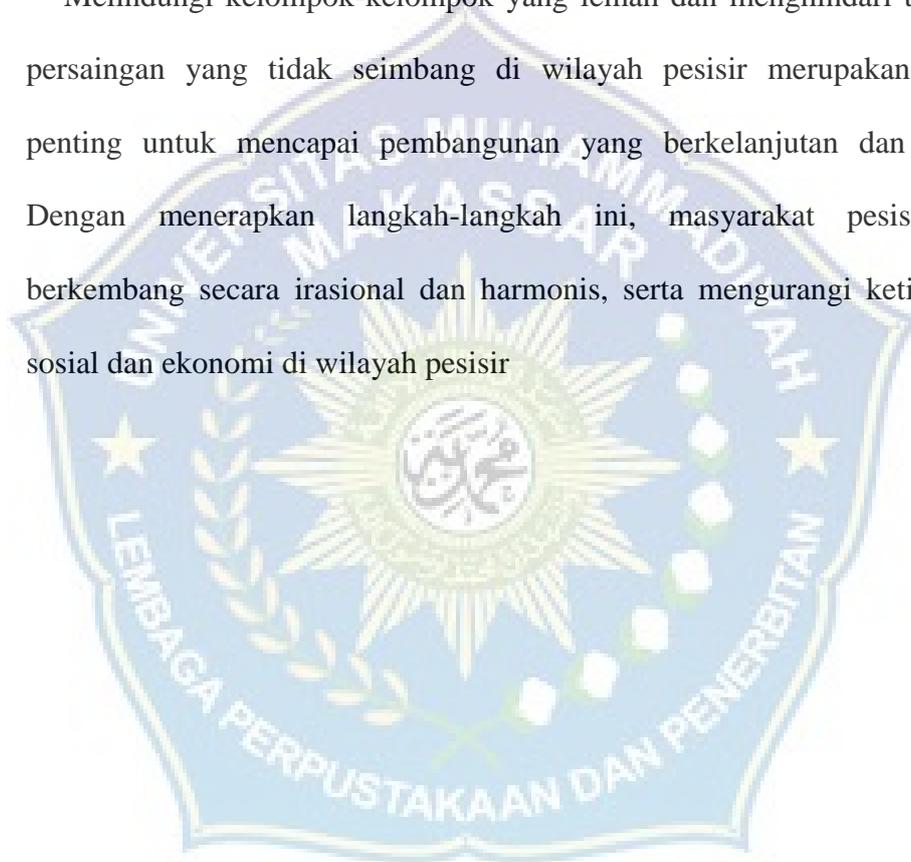
Beberapa contoh cara melindungi masyarakat pesisir, terutama kelompok lemah, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang inklusif untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan semua kelompok masyarakat pesisir diperhatikan dan diprioritaskan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.
2. Pastikan bahwa semua kelompok masyarakat pesisir memiliki akses yang setara dengan sumber daya alam dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur.
3. Berikan kesempatan bagi kelompok-kelompok lemah untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal dengan memberikan dukungan modal, pelatihan, dan akses ke pasar.
4. Pertahankan dan tegakkan aturan hukum yang adil dan berlaku untuk semua, untuk mencegah pelanggaran kekerasan oleh kelompok yang kuat dan memastikan keadilan dalam persaingan ekonomi.
5. Libatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga suara mereka didengar dan aspirasi mereka dipertimbangkan.
6. Lakukan upaya aktif untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan, termasuk kelompok-kelompok lemah.
7. Perhatikan kesetaraan gender dan berikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses sumber daya dan peluang di

wilayah pesisir.

8. Lakukan program edukasi dan kesadaran untuk melarang hak-hak masyarakat pesisir, memahami pentingnya keberlanjutan sumber daya alam, dan mensosialisasikan sikap yang adil dan inklusif dalam masyarakat.

Melindungi kelompok-kelompok yang lemah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang di wilayah pesisir merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, masyarakat pesisir dapat berkembang secara irasional dan harmonis, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah pesisir



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang diperoleh di lapangan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Rumput Laut di Kelurahan Pabiringa Kabupaten Jeneponto yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Pabiringa sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jeneponto dengan seringnya pemberian bantuan kepada kelompok petani yang ada, baik berupa dana maupun alat-alat budidaya serta penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok tersebut dalam upaya memandirikan mereka agar usaha budidaya dapat berkembang dengan baik.

Faktor penghambat dalam pembinaan Kelompok petani rumput laut adalah :

- a) Bantuan yang tidak tersalurkan secara tepat hal ini berkaitan erat dengan terbatasnya wawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat petani rumput laut
- b) Kurangnya pemahaman para pelaku usaha akan pentingnya program pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto; dan
- c) Ketergantungan yang berlebihan dari pihak pembudidaya rumput laut terhadap bantuan dari pemerintah.

Upaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jeneponto mengatasi hambatan dalam pemberdayaan Petani rumput laut di Kabupaten Jeneponto yaitu dengan:

- a. mengikutsertakan para pembudidaya dalam acara sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan yang melibatkan berbagai stakeholder untuk membuka wawasan dan pengetahuan berbisnis,
- b. penggunaan teknologi dan manajemen usaha.

B. Saran

1. Pemerintah daerah sebaiknya mengundang pihak swasta lebih banyak lagi untuk membangun industri pengolahan hasil atau lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian masyarakat pesisir sehingga hasilnya tidak hanya dijual mentah tapi dapat diolah menjadi produk-produk makanan ataupun kosmetik.
2. Pemerintah perlu melakukan rekrutmen pegawai yang punya kapasitas dan kemampuan untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana cara memanfaatkan sumberdaya yang ada, melihat tenaga teknis ini sangat kurang.
3. Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai bantuan program dan prosedurnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para masyarakat pesisir agar dapat mengembangkan budidaya rumput lautnya atau sumber daya yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fany, A., Konseptualisasi, P., Pemberdayaan, S., Stai, P., & Majenang, S. T. (2021). Konseptualitas Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 13–27.
<https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/44>
- Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 194–214.
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i1.13659>
- Fikry, M. S., & Ghozali, M. L. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2456–2472.
- Fithriyana, E. (2020). Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Al-Umron : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–9.
<https://doi.org/10.36840/alumron.v1i2.301>
- Garis, R. R., Garvera, R. R., & Sari, P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Melalui Inovasi Keripik Pisang Rumput Laut Di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih. *Abdimas Galuh*, 1(1), 83.
<https://doi.org/10.25157/ag.v1i1.2887>
- Irawan, A., & Tanzil, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan ...*, 9(2), 129–139.
<http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/3121>
- Labola, Y. A. (2019). Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, Bakat dan Ketahanan dalam Organisasi. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 7(1). <https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i1.2760>
- Lomboan, D. V. Y., Ruru, J., & Londa, V. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102), 28.

- Margolang, N. (2018). Jurnal Argo Riau. *Jurnal Argo Riau*, 2(4), 1–8.
- Paramita, A., & Syachbrani, W. (2019). Nilai Keekonomian Usaha Rumput Laut di Sulawesi Selatan. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 2(2), 1–12.
- Rahman, M. Z., & Pansyah, D. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Hutan Mangrove Untuk Budidaya Kepiting Bakau Desa Eat Mayang Sekotong Timur Lombok Barat. *Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan*, 7(2), 1–10.
- RAHMAYANTI, R., ROMPAS, W. Y., & PLANGITEN, N. N. (2020). Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Malalayang Ii Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92).
- Rusli, A., Dahlia, D., Ilijas, M. I., Alias, M., & Budiman, B. (2020). Strategi pengelolaan budidaya rumput laut *Kappaphycus alvarezii* di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. *Agrokompleks*, 20(1), 28–38.
<https://doi.org/10.51978/japp.v20i1.153>
- Safni, I. (2019). Berdaya Lewat Rumput Laut Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 4(1), 30–52.
<https://doi.org/10.31602/jpai.v4i1.1628>
- Sanger, G., & Assa, Y. R. (2018). PENGEMBANGAN PRODUKSI MINUMAN RUMPUT LAUT *Euchema cottonii* DI KELURAHAN MALALAYANG DUA KECAMATAN MALALAYANG, KOTA MANADO. *Media Teknologi Hasil Perikanan*, 6(2), 51.
<https://doi.org/10.35800/mthp.6.2.2018.19930>
- Suhu, B. la, & Wance, M. (2019). P a g e | 156. *Jurnal of Govrment*, 4(2), 156–172.
- Suriyanti, S., Arfah, A., & Wahyuni, N. (2022). Alternatif Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Rumput Laut (Nori) sebagai Produk Olahan Makanan Padat Gizi Kimbab Pada Kelompok Mitra Desa Tana *Celebes Journal of Community ...*, 1(1), 36–46.
<https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/celeb/article/view/185%0Ahttps://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/celeb/article/download/185/95>

Wahyudin, Y. (2012). An Economic Value of the Natural Seaweed Resources.
SSRN Electronic Journal, October. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1678973>



LAMPIRAN

	Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity · Professionalism · Entrepreneurship</small>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences <small>Menara Ibra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866-972 Fax: (0411) 865-588 Official Email: fosp@unismuh.ac.id Official Web: https://fosp.unismuh.ac.id</small>
---	---	--

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
Nomor : 1753/FSP/A.5-VI/X/1444/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Diva Fhadillah Az-zahra
Stambuk : 105611120719
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Rumput Laut di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto"

Pembimbing I : Drs. Ansyari Mone, M.Pd
Pembimbing II : Dr. Sudarmi, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggung jawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar
Pada tanggal : 21 Oktober 2022

D e k a n,

Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

 **Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia**
Progress for the Nation and Humankind | **Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi**
Public Administration - Government Studies - Communication Science

Surat Keterangan Pembimbing Penulisan Skripsi



Universitas
Muhammadiyah
Makassar

Magel - Professorastr - Universitas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqbal Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90223
Telp. (0411) 865 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email: info@unismuh.ac.id
Official Web: <https://unismuh.ac.id>

Nomor : 0682/FSP/A.6-VIII/V/1444H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Peneliti dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Diva Fhadillah Az-zahra

Stambuk : 105611120719

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

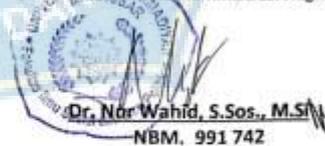
Lokasi Penelitian : Di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Judul Skripsi : **"Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Rumput Laut di Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto"**

Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.
Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 15 Mei 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM. 991 742

Surat Pengantar Penelitian untuk LP3M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 08555010 Fax (0411)365500 Makassar 90223 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1504/05/C.4-VIII/V/1444/2023

25 Syawal 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

15 May 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0682/FSP/A.6-VIII/V/1444 H/2023 M tanggal 15 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **DIVA FHADILLAH AZ ZAHRA**

No. Stambuk : **10561 1120719**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PEMANFAATAN RUMPUT LAUT DI KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Mei 2023 s/d 18 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,



05-23

Surat Permohonan Izin Penelitian untuk DPMPTSP Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 16844/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Jeneponto
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1504/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : DIVA FHADILLAH AZ-ZAHRA
Nomor Pokok : 10561120719
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sir Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PEMANFAATAN RUMPUT LAUT DI
KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 17 Mei s/d 15 Juli 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 17 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peninggal

Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jl. Ishak Iskandar No. 30 Bontosunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311
web : dpmptsp.jenepontokab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 73.4/397/IP/DPMPTSP/JP/V/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 136/V/REK-IP/DPMPTSP/2023.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **DIYA FHADILLAH AZ-ZAHRA**
Nomor Pokok : **105611120719**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
Lembaga : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Pekerjaan Peneliti : **MAHASISWA (S1)**
Alamat Peneliti : **JL. GEMBIRA TAMARUNANG KEL. PABIRINGA KEC. BINAMU**
Lokasi Penelitian : **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan judul :

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PEMANFAATAN RUMPUT LAUT DI KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

Lamanya Penelitian : 2023-05-17 s/d 2023-07-15

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila mana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
19/05/2023 12:47:42
KEPALA DINAS,



HI MERHYANI SP. M. SI
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19690202 199803 2 010

Tembusan :

Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Kabupaten Jeneponto



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. HV, Worang (Komp. PPI Tamarunang) Kel. Pabiringa Kec. Binamu Telp. ☎ (0419) 21091 – 21977
Fax 21977, Kode Pos 92315

REKOMENDASI

Nomor : 523.1/234/SEK-DKP/V/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. MITRADYANTO, M, SE, MM**
NIP : 19790511 200212 1 004
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan Surat Izin Penelitian tertanggal 19 Mei 2023 Nomor 73.A/397/IP/DPMPTSP/JP/V/2023, maka dengan ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto sebagai obyek pelaksanaan Penelitian memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : **DIVA FHADILLAH AZ-ZAHRA**
Nomor Pokok : 105611120719
Program Study : Ilmu Administrasi Negara
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Jln. Gembira Tamarunang Kel. Pabiringa Kec. Binamu, Kab. Jeneponto
Untuk melanjutkan proses Penelitian dalam rangka pengumpulan data dukung untuk menjadi bahan Penyusunan Skripsi dengan Judul :
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PEMANFAATAN RUMPUT LAUT DI KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diharapkan kepada Peneliti untuk menjaga ketertuntun sebagaimana tertuang dalam Surat Izin Penelitian, serta Peneliti dapat menyampaikan Laporan Hasil Akhir Penelitian dalam bentuk Proposal Fisik dan softcopy ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya serta Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Jeneponto, 24 Mei 2023

KELOMPOK PERPUSTAKA
KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

H. MITRADYANTO, M, SE, MM
Pangkat Pembina Tk. I
NIP. 19790511 200212 1 004

Surat Telah Melakukan Penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto











RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Diva Fhadillah Az-zahra, biasa dipanggil Diva. Lahir pada 20 Agustus 2001 di Jeneponto, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Basri. B, S.Pd dan Megawati Thahir. Penulis menempuh jalur pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007 di SD Inpres No.112 Tamarunang dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ditingkat menengah pertama di SMP Negeri 7 Binamu, Kota Jeneponto dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Binamu, Kota Jeneponto dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang In Syaa Allah nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PEMANFAATAN RUMPUT LAUT DI KELURAHAN PABIRINGA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO”**.